

**GAP KOMUNIKASI ANTARGENERASI  
DALAM PENGELOLAAN RADIO KOMUNITAS DI WILAYAH URBAN  
*CROSS-GENERATIONAL COMMUNICATION GAP  
IN COMMUNITY RADIO MANAGEMENT IN URBAN AREA***

**Diana Anggraeni<sup>1</sup>, Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2</sup>, Amiruddin Saleh<sup>3</sup>, dan Andi Faisal Bakti<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB

<sup>2,3</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB University

<sup>4</sup>Fakultas Komunikasi dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

dianaangraeni@univpancasila.ac.id

Diterima: 10 September 2020

Direvisi: 21 Oktober 2020

Disetujui: 19 Mei 2021

**ABSTRACT**

*A community radio station was set up to serve the interests and needs of the community. However, along with its development, community radio can not be fully run based on the concerns of its members. It must adapt to major challenges in order to survive. The research was conducted at the Dapur Remaja Community Radio (RKDR) in Cinangka, Sawangan, Depok, West Java. The aim of this research is to address the cross-generational communication gap that occurred after the second-generation manager has led the station. The critical constructivist research paradigm was used in this study. Data was collected using FGDs, in-depth interviews, and field observations. The results of the study found that there was a communication gap between younger community radio managers and older community members, due to changes in social and cultural communication patterns, which affected their understanding of community radio management. The younger managers are considered less accommodative towards existing community activities and are more interested in finding ways to make community radio more profitable, so that community engagement, values and interests are understated.*

*Keywords: Community Radio Management, Communication Gap between Generations, Community Engagement*

**ABSTRAK**

Radio komunitas didirikan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan komunitas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, radio komunitas tidak dapat sepenuhnya beroperasi sesuai aspirasi anggotanya. Radio komunitas juga harus beradaptasi dengan beragam perkembangan agar dapat mempertahankan kelangsungan eksistensinya. Penelitian yang dilakukan di Radio Komunitas Dapur Remaja (RKDR) di Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat ini bertujuan untuk mengkaji *gap* komunikasi antargenerasi dalam pengelolaan radio komunitas di perkotaan setelah generasi kedua memimpin manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi *gap* komunikasi antara pengelola baru dengan anggota komunitas lama, yang disebabkan adanya perubahan pola interaksi komunikasi secara sosial dan budaya, yang berdampak pada perbedaan pemahaman mengenai pengelolaan radio komunitas. Pengelola radio komunitas, yang merupakan generasi muda, dianggap kurang mengakomodasi kegiatan komunitas sebelumnya dan lebih fokus memikirkan strategi baru untuk mendulang profit dari radio komunitas, sehingga partisipasi komunitas, nilai-nilai dan kepentingan komunitas kurang diperhatikan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Radio Komunitas, *Gap* Komunikasi Antargenerasi, Partisipasi Komunitas

## PENDAHULUAN

Keberadaan media komunitas dalam menyukseskan pembangunan merupakan sebuah kebutuhan. Media komunitas menjadi jawaban bagi kebutuhan informasi masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui media arus utama (Purnamasari *et al.*, 2014). Media komunitas menjadi jembatan informasi bagi masyarakat dalam mempromosikan potensi wilayah, atau menyampaikan kondisi dan kebutuhan wilayah yang tidak teridentifikasi sebelumnya, kepada pihak terkait. Komunitas dapat memanfaatkan media komunitas sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Kekuatan media lokal terletak pada konten lokal dan partisipasi masyarakatnya. Adanya partisipasi publik menunjukkan bahwa masyarakat bersikap aktif, bukan pasif, sehingga aspirasi datang dari bawah atau *bottom-up* (Bakti, 2004).

Paradigma pembangunan saat ini cenderung mengarah pada model *bottom up* (Aminah *et al.*, 2014; Triyono, 2014), yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi, pembangunan diharapkan akan berdampak pada perubahan sosial yang memengaruhi sistem di masyarakat (Yunita, 2017). Wilkins *et al.*, (2014) menyebutkan bahwa komunikasi partisipatif akan mendorong masyarakat untuk memimpin dan turut serta dalam gerakan sosial, mencari solusi, mendiskusikan masalah secara bersama, mendengarkan masukan serta mengambil bagian aktif dalam menyelesaikan tantangan.

Dalam proses ini, masyarakat dapat saling menguatkan identitas dan kesadaran kolektif, mempromosikan keberagaman, mengedepankan ekspresi dan identitas multikultural melalui dialog horizontal, untuk membangun partisipasi horizontal (Wilkins *et al.*, 2014). Pembangunan model ini

membutuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Sementara itu, masyarakat di wilayah perkotaan, tanpa disadari, telah terbawa oleh dinamika struktur sosial tertentu, sehingga kehilangan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan secara bebas (Kahn & Kellner, 2007). Kebebasan yang dimaksud adalah pemahaman akan perannya untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan penindasan yang bersifat struktural (Freire, 2018). Melalui pendidikan yang humanis dan membebaskan, masyarakat akan membangun dunianya dengan membuka kesadaran kritis dan kreatif sesuai dengan realitas (Abdillah, 2017; Freire, 2018; Wijanarko *et al.*, 2014). Hal itu kemudian membentuk adanya komunikasi kesadaran kritis, yang menekankan bahwa manusia merupakan aktor utama dalam menentukan tujuan utamanya (Wijanarko *et al.*, 2014). Sistem dan struktur sosial dianggap sebagai penyebab terjadinya pelemahan, diskriminasi dan dehumanisasi terhadap kaum tertindas. Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan adanya penyadaran kritis yang dilakukan melalui pendidikan yang membebaskan dengan materi pengalaman sehari-hari sebagai subjek pembelajaran. Pawito (2007) menyebutkan bahwa media komunitas dapat menjadi salah satu media penyadaran kritis untuk membangun bangsa dan masyarakat, apabila dasar pemikiran mengenai pembangunan tersebut bertujuan untuk memanusiakan manusia.

Radio komunitas, menurut AMARC, sebuah organisasi dunia yang menaungi media komunitas adalah media yang bisa memenuhi kebutuhan informasi untuk kelompok-kelompok marjinal (Takariani, 2013). Landasan hukum pendirian radio komunitas adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penetapan UU ini dianggap sebagai momentum kebebasan dan transparansi informasi publik (Yuliasari *et al.*, 2017). Radio komunitas pun kemudian dianggap sebagai media alternatif. Chikaipa & Gunde (2020) menyatakan bahwa radio komunitas memiliki fungsi untuk mempromosikan dan mengembangkan bahasa dan budaya lokal Malawi guna memberikan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk belajar secara formal. Berbeda dengan temuan tersebut, Radio Komunitas Dapur Remaja (RKDR) di Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat yang berada di wilayah perkotaan justru tidak mampu mempertahankan aspirasi dan nilai-nilai lokal akibat adanya berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Al-hassan *et al.* (2011) menyatakan bahwa lingkungan eksternal sangat memengaruhi radio komunitas. Eddyono (2012) juga menyebutkan, kegagalan pengelolaan radio komunitas dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dalam konteks masyarakat kota, radio komunitas dipengaruhi oleh karakteristik individual warganya yang cenderung bersikap lebih tegas dan rasional (Nasdian, 2014). Permasalahan utama yang muncul di radio tersebut terkait dengan perbedaan pemahaman mengenai konsep dan manajemen pengelolaan radio antara anggota komunitas dengan pengelolanya, serta ketidakpahaman tentang kebutuhan anggota komunitas dan manajemen.

Pergantian pengurus dari generasi terdahulu kepada generasi yang lebih muda memunculkan perbedaan dalam memahami perubahan sosial budaya. Hal ini kemudian memengaruhi komunikasi dalam mengelola radio komunitas. Konflik timbul ketika ada pihak-pihak yang tidak bersepakat atau

berbeda persepsi dalam upaya mencapai tujuan. Konflik dapat dinyatakan dalam bentuk verbal dan nonverbal, baik secara langsung maupun tidak. Konflik dalam komunitas dapat berawal dari pertentangan antarpribadi berupa sindiran, kritik, perilaku mengabaikan pihak lain dan sebagainya, serta ketika perbedaan dianggap sebagai sebuah masalah (Pace & Faules, 2010).

Konflik antarpribadi yang terjadi dalam komunitas harus segera diselesaikan. Jika tidak, hal tersebut akan membuat konflik berkembang menjadi konflik antarkelompok. Konflik mendasar dalam komunitas disebabkan adanya sifat egosentris, ketika salah satu pihak menganggap pendapatnya paling benar dan bersikap antikritik (Asenjo, 2019). Penelitian Effendy (2013) menemukan bahwa masih banyak penggiat radio komunitas belum memahami esensi pendirian media komunitas ini, sehingga partisipasi anggota yang diharapkan tidak muncul. Partisipasi anggota komunitas dalam mengembangkan komunitas terlihat masih sangat sedikit (Anggraeni, 2018). Kalau pun ada aktivitas yang menunjukkan partisipasi anggota komunitas, hal itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pengelola radio komunitas. Setiap anggota komunitas memiliki fungsi dan satu dengan yang lain saling berinteraksi sebagai satu kesatuan, apa pun peran dan bentuk kegiatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni (2018) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah sekitar radio komunitas berada, umumnya merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Mereka ini memiliki karakteristik berpendidikan rendah dan berpenghasilan terbatas. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan mereka saja, mereka sangat kerepotan, apalagi untuk memikirkan

hal-hal yang lebih besar di luar dirinya. Upaya membangun kesadaran menjadi prioritas dalam mengembangkan potensi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Hal ini juga telah disampaikan melalui siaran di radio komunitas. Kajian mengenai radio komunitas bukanlah hal yang baru dan sudah banyak dilakukan. Penelitian tentang aspek peran dan fungsinya sebagai media warga dalam upaya memberdayakan komunitasnya, telah dilakukan oleh Chaerowati *et al.* (2013), Effendy (2013), Ngugi (2015) dan Podber (2012). Studi serupa juga dilakukan oleh Bello & Wilkinson (2017), Gaynor & O'Brien (2012), dan Kridasaksana *et al.* (2015) terkait penggunaan ruang publik, agen perubahan, dan regulasi yang tidak banyak berubah, dengan banyak mengambil kajian di Indonesia.

Studi komprehensif tentang problem internal radio komunitas belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji faktor internal secara lebih mendalam, terutama terkait konflik regenerasi kepengurusan dan kesenjangan komunikasi antara pengurus baru yang masih muda dan anggota komunitas yang lebih senior, yang berdampak pada pengelolaan radio komunitas. Sebagai generasi baru yang melanjutkan pengelolaan radio tersebut, anak muda membawa perubahan dalam pengelolaan dan kegiatan. Berdasarkan pengamatan peneliti, para pengelola RKDR yang baru memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi dan berupaya memperjuangkan legalitas RKDR. Akan tetapi, mereka tidak memahami siapa komunitas mereka, sehingga berdampak pada berkurangnya kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan oleh generasi sebelumnya. Para pengurus baru ini lebih memilih untuk mengembangkan kegiatan yang berfokus kepada generasi sekarang. Hal ini

menyebabkan generasi lama sebagai pihak yang membesarkan RKDR merasa ditinggalkan. Berdasarkan pemahaman atas hal tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan analisis terhadap terjadinya *gap* komunikasi antargenerasi di RKDR yang berdampak pada menurunnya partisipasi anggota komunitas dan nilai-nilai lokal yang semula mendasari pembentukan radio komunitas ini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis kritis. Fokus penelitian ini adalah interaksi komunikasi antara pengelola Radio Komunitas Dapur Remaja (RKDR) dengan anggota komunitas di wilayah kelurahan Cinangka, Depok, Jawa Barat. Komunitas, menurut PP No. 51 Tahun 2005, merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yakni penyelidikan mendalam atas berbagai informasi mengenai suatu kasus dan secara intensif fokus menyelidiki satu atau himpunan kecil informasi detail kasus tersebut dan konteksnya (Neuman, 2015). Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara terhadap pengelola RKDR Dede Nurdiansyah, anggota komunitas Dapur Remaja dari generasi muda, yakni IA, dan HK, yang mewakili generasi lama. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan RKDR. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber media daring/cetak, literatur dan kajian terdahulu tentang radio komunitas. Pengambilan data dilakukan sejak Desember 2017 hingga Juli 2020, di Kampung Kebon, Kelurahan

Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pengolahan analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* Nvivo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Radio Komunitas Dapur Remaja (RKDR) didirikan pada tahun 1998. Radio ini berada di wilayah Kampung Kebon, Kelurahan Cinangka, Sawangan, Depok. Saat ini, RKDR menjadi satu-satunya radio komunitas di Depok yang memiliki izin Badan Hukum KumHam, Perkumpulan Komunitas Dapur Remaja Nomor: AHU-0009240.AH.01.07 Tahun 2017, Izin prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) No. 267 Tahun 2017, dan Izin Stasiun Radio (ISR) No. 01945903-000SU/2020172022. Walaupun dari aspek regulasi, radio ini hanya diizinkan untuk melakukan siaran pada radius diameter 2.5 km, daya jangkau radio dapat terdengar hingga wilayah yang lebih jauh. Apalagi, saat ini RKDR telah dapat bersiaran melalui *streaming*.

Pendirian radio komunitas ini pada awalnya ditujukan kepada masyarakat yang berlatar belakang budaya Betawi. Tujuannya untuk melayani kebutuhan informasi dan menjadi media alternatif warga dalam menginformasikan berbagai kegiatan, seperti arisan rombongan, silaturahmi, kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, dan pelatihan keterampilan seperti pembuatan sablon, serta melakukan pengembangan usaha dan keterampilan yang memanfaatkan potensi lokal. Saat ini, pengelolaan radio diserahkan kepada generasi kedua. Sebagai generasi baru yang melanjutkan pengelolaan radio tersebut, pengurus yang baru membawa perubahan dalam pengelolaan dan kegiatan.

Berlokasi di wilayah pinggiran ibukota, Kampung Kebon, kelurahan Cinangka ini

mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Wilayah yang dilalui sungai Pesanggrahan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di wilayah Depok, yakni sebanyak 6.324/km persegi (BPS Kota Depok, 2018). RKDR memiliki banyak kegiatan yang ditujukan bagi anak muda, yang membuat radio komunitas menjadi tempat bertukar informasi dan bersosialisasi.

Proses pengurusan perizinan radio ini mulai dirintis sejak tahun 2003. Perjalanan panjang dalam mengurus regulasi dan perizinan, tidak hanya memakan biaya, namun juga menguras waktu dan tenaga pengelola. Dalam regulasi perizinan misalnya, terdapat aturan yang mengharuskan radio komunitas untuk menggunakan perangkat radio bersertifikat yang berharga mahal. Di samping itu, pemenuhan syarat administrasi juga membuat pengelola mengalami kejenuhan (Wahyuningsih, 2014). Adanya regulasi yang melarang radio komunitas untuk mendapatkan pemasukan komersial menyebabkan pendanaannya bergantung sepenuhnya pada partisipasi anggota, sehingga proses perizinan tersebut terhenti. Padahal, sebuah radio yang tidak memiliki izin siar akan dianggap sebagai radio gelap yang menjadi sasaran *sweeping*. Hal itu menyulitkan pengelola untuk melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain agar mendapatkan iklan layanan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan. Saat ini, pendanaan di RKDR mengandalkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Sebelumnya, pengelola radio pernah melakukan *fundraising* melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan berbayar bagi anggota komunitas. Namun hal itu tidak berjalan. Biaya dan proses perizinan yang rumit dan mahal ini membuat pengelola RKDR harus mencari alternatif pemasukan

dan tidak bisa lagi mengandalkan partisipasi anggota komunitas.

Perubahan pola interaksi pada masyarakat akibat pembangunan juga memengaruhi pola manajemen pengelola RKDR. Anggota komunitas yang sebagian besar sudah senior masih setia mendengarkan siaran RKDR, namun mulai kurang aktif dalam kegiatan *off air*. Di sisi lain, generasi muda yang menggantikan kepengurusan mereka tidak dapat meneruskan kegiatan sebelumnya. Segelintir anak muda berusaha mempertahankan kegiatan komunitas yang sebelumnya biasa diadakan. Akan tetapi, usaha mereka kurang mendapatkan dukungan promosi dari pengelola karena dianggap kurang memberikan *benefit* bagi radio. Usulan untuk memberikan slot waktu siaran bagi kegiatan komunitas yang berada di bawah pengelola Dapur Remaja pun tidak mendapatkan respons. Pengelola yang baru tampaknya tidak memahami peran komunitas sebagai modal sosial dalam mendukung proses pembangunan di suatu wilayah. Modal sosial merupakan potensi yang ada pada masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (Abdullah, 2013). Hal ini pada gilirannya akan memunculkan komunitas sebagai satu kesatuan yang utuh, solid dan menjadi sebuah identitas yang mencerminkan lingkungannya, serta memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan akses informasi. Dalam konteks penelitian ini, jika komunitas dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah modal sosial yang sangat kuat yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola radio komunitas untuk mendapatkan informasi detail mengenai situasi dan kondisi wilayahnya. Komunitas dan modal sosial menjadi perekat dalam membangun hubungan yang keberadaannya

akan dirasakan secara bersama (Abdullah, 2013). Sejalan dengan pernyataan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Matthews (2016) menyatakan bahwa modal sosial saat ini melibatkan teknologi dalam memberdayakan komunitas, terutama untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga secara lebih luas.

Perubahan budaya yang disebabkan oleh proses pembangunan juga turut memengaruhi relasi antara generasi muda dan tua. Budaya guyub dengan solidaritas tinggi yang ditemukan pada generasi tua tidak ditemukan lagi pada generasi muda yang menjadi bagian dari komunitas saat ini. Keberadaan RKDR sejajar dengan subkomunitas lain yang berada dalam Perkumpulan Komunitas Dapur Remaja. Subkomunitas tersebut adalah *Green Campbone*, yang memiliki kegiatan sosial dan lingkungan, *Networking* yang bergerak dalam usaha internet dan subkomunitas *Publishing* yang bergerak dalam pelatihan, seperti usaha sablon, penyiaran dan sebagainya. Anggota komunitas dari generasi tua hanya dilibatkan sebagai penyiar. Dalam pengelolaan manajemen yang baru, kegiatan komunitas RKDR sudah tidak berjalan lagi. Fokus pengelola lebih ditujukan pada pengembangan kegiatan bagi anak muda saja. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, anak muda yang menjadi anggota dari komunitas saat ini tidak banyak berinteraksi dengan anggota komunitas dari generasi lama.

Agustin (2011) dalam studinya tentang budaya anak muda menyebutkan bahwa generasi muda memiliki sejumlah karakteristik, antara lain kurangnya rasa hormat kepada generasi tua, ketidakpedulian dengan sekitar dan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Anak muda sebagai anggota komunitas yang berada di wilayah

perkotaan cenderung lebih memilih kegiatan yang sedang digemari. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah seorang anggota komunitas *Green Campbone*, IA (Maret, 2020), dikatakan bahwa banyak anggota yang tidak lagi mengikuti kegiatan komunitas dengan berbagai macam alasan. Dalam konteks penelitian ini ditemukan bahwa generasi lama memiliki *awareness* dan *respect* terhadap potensi lokal wilayah Cinangka, yang dituangkan dalam materi siaran di radio komunitas. Hal yang sama tidak terlihat lagi dalam materi siaran yang dikelola oleh generasi mudanya. Upaya melakukan integrasi dan transformasi tidak terlalu berhasil walaupun ada upaya untuk melakukan pemberdayaan yang menggabungkan pengetahuan dan praktik pada generasi saat ini. Proses komunikasi untuk meningkatkan kesadaran tidak berjalan efektif dan sangat jauh dari upaya mempertahankan nilai komunitas. Kegiatan berdiskusi, bercerita, berbagi pengalaman yang melibatkan potensi anak muda sesuai *tagline* RKDR tidak banyak dilakukan. Padahal, kesadaran masyarakat merupakan modal sosial karena khalayak secara aktif akan berupaya mencari dan memahami realitas sosial sesuai dengan karakteristik wilayahnya (Chaerowati *et al.*, 2013; Freire, 2018).

### **Perubahan dalam Pengelolaan Radio Komunitas Dapur Remaja**

Hasil olah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan FGD memperlihatkan adanya perubahan dalam pengelolaan radio komunitas dan keinginan untuk menjadikan radio komunitas sebagai lembaga penyiaran yang menghasilkan profit. Beratnya pembiayaan saat ini menjadi salah satu pertimbangan pengelola. Seperti diketahui

bahwa radio komunitas memiliki 3 karakter, yaitu: 1) tidak mencari keuntungan, 2) kepemilikan dan kontrol berada pada komunitas, dan 3) partisipasi komunitas (Birowo *et al.*, 2015). Dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 51 Tahun 2005 secara tegas dinyatakan bahwa radio komunitas tidak boleh menayangkan iklan secara komersial. Padahal, diketahui bahwa salah satu sumber utama dalam pemasukan media berasal dari sektor iklan. Di sisi lain, peran serta anggota komunitas tidak ada. Pada kepengurusan sebelumnya, penarikan donasi/iuran anggota sempat dilakukan oleh pengurus komunitas. Namun, belakangan ditemukan adanya penyelewengan dana donasi yang masuk dengan menggunakan nama pengelola radio komunitas. Hal inilah yang membuat pengelola tidak lagi menjadikan komunitas sebagai pendukung radio komunitas. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas generasi lama dan selalu mendapat dukungan dari pengelola RKDR terdahulu, sekarang tidak dilakukan lagi sejak terjadinya penyalahgunaan dana komunitas yang mencoreng nama RKDR. Keberadaan anggota dalam sebuah media komunitas digunakan untuk membentuk identitas. Selain itu, mereka juga menjadi kekuatan dan potensi sumber daya yang saling mendukung dan membentuk solidaritas untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pengelola RKDR adalah menyelenggarakan pelatihan. Akan tetapi, menurut salah seorang anggota komunitas, IA, hal ini juga tidak berjalan karena keterbatasan SDM dan kecenderungan anggota komunitas saat ini yang lebih memilih kegiatan yang sifatnya kekinian, seperti berkunjung ke pusat pertokoan, bermain *game online* atau memilih

beristirahat di rumah saja setelah penat bekerja.

Sumber pendanaan RKDR saat ini lebih banyak berasal dari bantuan lembaga/pemerintah (DPRD dan pemerintah kota) dan slot iklan layanan masyarakat (ILM). Iuran komunitas saat ini sudah tidak lagi dipungut dari para anggota sejak terjadinya penyalahgunaan keuangan komunitas yang mencoreng citra RKDR dan menyebabkan ditiadakannya beberapa kegiatan pelatihan berbayar. Skema pelatihan berbayar sengaja didesain untuk menjamin komitmen peserta dalam mengikuti pelatihan. Pengalaman dari penyelenggaraan beberapa pelatihan yang tidak berbayar menunjukkan bahwa peserta dengan gampang membatalkan keikutsertaannya. Dana yang didapat dari pelatihan kemudian digunakan pengelola untuk menambah uang kas radio.

Kondisi pendanaan RKDR berbeda dengan radio komunitas di wilayah pedesaan yang sumber pendanaannya berasal dari iuran anggota, sumbangan pengelola, ILM, bantuan dana desa dan *sponsorship* (Chaerowati *et al.*, 2013). Sebagai radio komunitas yang berada di wilayah perkotaan dengan kemudahan akses ke semua fasilitas umum, pendanaan RKDR lebih banyak berasal dari luar komunitas (Sanjaya & Pandiangan, 2019). RKDR tetap berupaya mengajak para pemilik usaha di seputar wilayah Sawangan untuk beriklan di radionya. Akan tetapi, terbatasnya jarak jangkauan siaran telah mengurangi minat mereka untuk beriklan di RKDR.

Saat ini, materi siaran di RKDR tetap menggunakan nama program siaran yang menjadi ciri khasnya sejak radio ini berdiri. Isi materi siaran didominasi unsur hiburan, seperti musik dangdut yang banyak diminta oleh pendengar setia, *talk show* dengan birokrasi

pemerintah, *edutainment*, dan menyiarkan iklan layanan masyarakat.

Dari hasil FGD ditemukan bahwa saat ini program siaran tidak lagi mengakomodasi masukan dari anggota komunitas karena dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sementara menurut pengelola, interaksi penyiar dengan pendengar lebih kepada perbincangan semata. Menurut peneliti, hal tersebut justru merupakan karakteristik radio komunitas yang menjadi ruang diskusi (apa pun bentuknya). Fungsi radio komunitas sebagai media perbincangan (wahana diskursus) sangat dibutuhkan sehingga warga dapat mengekspresikan pendapat dan kepentingannya (Birowo *et al.*, 2015).

Saat ini, manajemen radio komunitas Dapur Remaja dipimpin oleh generasi kedua, yang dibantu oleh beberapa anggota sebagai penyiar lama, yang juga merupakan anggota komunitas. Di bawah pengelolaan generasi kedua ini, penyiar dituntut untuk lebih profesional. Akan tetapi, harapan itu sulit diwujudkan karena sejumlah sebab. Pertama, penyiar tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang penyiaran. Aktivitas siaran dilakukan sebagai hobi, *learning by doing* dan keinginan untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan anggota komunitas yang sudah tersebar di beberapa daerah. Kedua, radio komunitas belum bisa memberikan honor kepada penyiar, sehingga ketika penyiar mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, mereka berhenti menjadi penyiar RKDR.

Dari sisi teknologi, radio ini tidak hanya mengandalkan siaran analog di frekuensi 107.8 FM, namun juga mulai memanfaatkan siaran digital melalui *streaming*, media sosial dan *podcast*. Menurut pengelola RKDR, Dede



Nurdiansyah (Januari, 2020), saat ini radio komunitas sedang melakukan transformasi ke arah yang lebih modern dan dapat menjadi lembaga siaran yang lebih menguntungkan. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi perbedaan antara radio komunitas dengan radio swasta karena pendengar RKDR juga tidak memahami fungsi dan peran radio komunitas. Audiens menganggap keberadaan RKDR sama dengan radio komersial lainnya. Partisipasi dan dukungan komunitas, menurut Dede, tidak ada dan tidak jelas, sehingga keberadaan RKDR sebagai radio komunitas yang seharusnya mengakomodasi partisipasi warga tidak terlihat. Masalah ini masih diperumit dengan aturan regulasi yang memberatkan radio komunitas. Padahal, radio komunitas memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya, sehingga para pengelola harus melakukan transformasi manajemen agar RKDR bisa lebih menghasilkan keuntungan finansial.

Tabel 1. Perbedaan Pengelolaan di RKDR menurut Generasi

Deskripsi	Generasi Muda	Generasi Tua
Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat sepenuhnya dalam pengelolaan RKDR</li> <li>Tidak banyak yang menjadi penyiar RKDR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terlibat dalam pengelolaan RKDR</li> <li>Banyak yang menjadi penyiar karena sudah memiliki basis penggemar</li> </ul>
Persepsi mengenai Radio Komunitas	Tempat berkumpul saat ada kegiatan	Tempat menjalin hubungan sosial/pertemanan (relasi dengan audiens atau anggota komunitas)
Persepsi Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersikap lebih realistis terkait pendanaan</li> <li>Tidak ada partisipasi dalam bentuk pengumpulan dana dari komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memperhatikan aspek pendanaan.</li> <li>Partisipasi ada tapi namun berbentuk barang, tenaga, waktu</li> </ul>
Tuntutan/Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiar harus lebih profesional</li> <li>RKDR harus bisa bersaing dengan LPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola saat ini harus lebih menghargai generasi tua</li> <li>Pengelola harus transparan dalam mengelola keuangan</li> <li>Pengelola harus lebih terbuka terhadap aspirasi komunitas</li> </ul>
Program	Hiburan: segala	Hiburan: Jenis musik

jenis musik

dangdut, pop betawi

Terkait kegiatan *monitoring* dan evaluasi (*money*), sejak tahun 2018 hingga saat ini belum dilakukan lagi. Padahal, sebelumnya *money* biasanya diadakan setiap triwulan dengan melakukan diskusi tatap muka (Anggraeni, 2018). Sarana komunikasi antaranggota lebih sering dilakukan melalui grup WhatsApp. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota komunitas HK (Maret 2020), diketahui bahwa dalam *money*, partisipasi anggota komunitas kurang terlihat. Mereka cenderung bersikap pasif sehingga komunikasi dalam forum tersebut lebih didominasi oleh pengelola.

### Lunturnya Nilai-Nilai Komunitas dalam Pengelolaan Radio Komunitas

Basis pendirian radio komunitas adalah partisipasi dan kearifan lokal di suatu wilayah (Birowo *et al.*, 2015). Partisipasi adalah sebuah gerakan untuk memberdayakan masyarakat (Bakti, 2004). Sementara itu, kearifan lokal merupakan gagasan setempat yang berisikan kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang diikuti oleh masyarakatnya (Sarmiati, 2012; Yuliasari *et al.*, 2017).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendirian RKDR berawal dari sekumpulan masyarakat berbudaya Betawi yang pindah ke pinggiran kota karena tergusur oleh pesatnya pembangunan Jakarta. Pascapengusuran, masyarakat Betawi hidup terpencar-pencar di berbagai wilayah pinggiran Jakarta. Hal ini mengakibatkan relasi di antara mereka yang semula guyup menjadi renggang. Untuk menjalin silaturahmi yang sempat terputus itulah kemudian didirikan media komunitas oleh pendirinya. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah arisan rombongan, pengajian dan

sebagainya. Setelah pendiri meninggal, pengelolaan RKDR diteruskan oleh salah satu anaknya, yang orientasinya lebih kepada kegiatan anak muda dan mulai mengurangi kegiatan yang melibatkan anggota komunitas dari generasi yang lebih tua. Hal inilah yang menjadikan pengelolaan RKDR saat ini kurang memahami hakikat komunitas. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengelola saat ini menghadapi masalah pembiayaan. Padahal, saat dipegang oleh pengelola sebelumnya, pembiayaan tidak menjadi masalah. Hal ini terjadi lantaran pengelolaan RKDR sebelumnya lebih didasari oleh hobi dan keinginan untuk menyambung silaturahmi serta masih mendapatkan dukungan pembiayaan dari anggota komunitas.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengelola yang baru menganggap bahwa komunitas bukan lagi pendukung utama RKDR, karena tidak adanya lagi kegiatan rutin yang dilakukan dan partisipasi anggota, terutama pembiayaan untuk perawatan dan operasional RKDR. Pengelola baru menganggap bahwa jangkauan khalayak pendengar radio sudah lebih luas dengan adanya teknologi digital. Dalam FGD, anggota komunitas lama menyampaikan harapan kepada pengelola baru untuk membangkitkan kembali program dan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola yang lama. Namun, keinginan dan kepentingan komunitas tersebut belum dapat diakomodasi karena adanya perbedaan persepsi dalam melihat kedudukan radio komunitas. Oleh karena itu, komunitas merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi. Padahal, pada awal pembentukannya, media komunitas ini merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan informasi, mengekspresikan pendapat dan kepentingan warga yang tidak didapatkan melalui media lain. Komunitas

tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menentukan isi program. Berkurangnya partisipasi anggota komunitas terjadi karena faktor internal dan eksternal. Pengelola saat ini tidak lagi melibatkan komunitas karena adanya beberapa peristiwa yang merugikan RKDR, seperti penyalahgunaan iuran komunitas.

Konflik menjadi penghambat utama dalam pengembangan komunitas. Alabi dan Famakinwa (2017) menyatakan bahwa konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari, sehingga harus disikapi serius oleh para pemangku kepentingan. Kegagalan dalam berkomunikasi dengan komunitas akan menyebabkan penundaan, disinformasi atau kemacetan dalam mengirimkan pesan, sehingga menimbulkan ketegangan dan perasaan negatif dari anggota komunitas (Pace & Faules, 2010). Selaras dengan pernyataan di atas, Usman (2001) menyatakan bahwa konflik akan muncul jika sebuah informasi yang berasal dari orang dalam (individu, kelompok maupun masyarakat) tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dari sini, akan muncul benturan sosial yang tidak dapat dihindari, baik dalam bentuk fisik maupun penekanan terhadap ide yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus RKDR, konflik yang terjadi telah menimbulkan ketidakcocokan, keragu-ruguan dan kecurigaan terhadap informasi yang disampaikan kedua belah pihak, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dan pembiaran atas kondisi yang ada.

Peneliti melihat keberadaan RKDR yang berada di wilayah perkotaan memberi kontribusi terhadap luntarnya nilai-nilai komunitas. Masyarakat di perkotaan memiliki kemudahan fasilitas, sehingga gampang mencari beragam alternatif kegiatan dan meninggalkan kegiatan yang diadakan oleh pengelola radio komunitas. Luntarnya

kesadaran bahwa radio komunitas adalah media yang menjembatani kepentingan komunitas juga sangat terlihat. Dalam wawancaranya, anggota komunitas menyatakan bahwa ada pihak lain yang tidak peduli dan cenderung apatis dengan apa yang dilakukan radio komunitas karena kepentingannya tidak diakomodasi.

Proses regenerasi dari pengelola sebelumnya juga tidak berjalan mulus. Hal ini dapat dilihat dari mulai ditinggalkannya nilai-nilai dan pemahaman tentang radio komunitas. Pemahaman tentang keberadaan radio komunitas juga berubah. Radio komunitas memiliki karakteristik sebagai media yang memiliki cakupan terbatas. Ada partisipasi komunitas, definisi komunitas, kedekatan dengan situasi lokal, teknologi dengan biaya terjangkau serta prinsip dari, oleh dan untuk komunitas (Birowo *et al.*, 2015). Oleh karena itu, dalam praktiknya radio komunitas harus mampu menyediakan konten untuk warga komunitas dengan melibatkan dan mendorong anggota komunitas untuk secara aktif memproduksi program siarannya (Juditha, 2015). Akan tetapi, pengelola saat ini menganggap bahwa keberadaan komunitas tidak berdampak bagi radio komunitas. Tidak hanya dari sisi ketiadaan dukungan dan partisipasi, namun juga karena muncul penyalahgunaan nama RKDR untuk kepentingan pribadi. Proses komunikasi untuk membangkitkan kesadaran kurang berjalan. Nilai-nilai komunitas perlahan hilang karena adanya disorientasi terhadap makna komunitas.

Setelah pendiri meninggal, pengelolaan RKDR diteruskan oleh salah seorang putranya, yang lebih menitikberatkan pada kegiatan anak muda dan mengurangi kegiatan yang melibatkan anggota komunitas dari generasi

yang lebih tua. Hal inilah yang menjadikan pengelolaan RKDR saat ini kurang berorientasi pada komunitas. Menurut pengamatan peneliti, pengelola saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan, salah satunya adalah pembiayaan. Masalah pembiayaan bukanlah hal yang memberatkan saat pengelolaan RKDR masih dipegang oleh pendirinya. Ini terjadi karena pengelolaan RKDR sebelumnya lebih didasari oleh hobi dan keinginan untuk menyambung silaturahmi. Selain itu, RKDR juga masih mendapatkan dukungan pembiayaan dari anggota komunitas. Begitu pula dengan kepedulian dan perhatian pengelola terhadap nilai lokal. Saat itu, RKDR menyelenggarakan beragam aktivitas komunitas yang menjadikan komunitas solid, guyub, erat, dan dekat bagi masyarakat berlatar budaya Betawi. Upaya untuk mengintegrasikan nilai lokal dengan melibatkan kembali komunitas terhalang oleh perbedaan pola pikir dan ketidakmampuan memahami situasi yang ada (Goodman & West-Olatunji, 2009).

Upaya pengembangan program dengan memberdayakan warga komunitas juga terhambat masalah SDM dan keterbatasan pendanaan. Tekanan tersebut membuat jenuh pengelola dalam mempertahankan eksistensi RKDR, sehingga mendorong mereka untuk bertransformasi menjadi media yang menguntungkan secara bisnis. Pengelola baru menilai bahwa pengurusan perizinan dan regulasi RKDR rumit, sulit dan lama. Selain itu, mereka juga memandang bahwa kewajiban radio komunitas tidak berbeda dengan radio komersial. Kedua hal ini membuat pengelola berkesimpulan bahwa keberadaan dan pengelolaan radio komunitas harus dilakukan melalui hubungan timbal balik dan tidak bisa

dilakukan oleh satu pihak. Keterbatasan SDM serta ketidakmampuan memanfaatkan jaringan dengan baik menyebabkan tingkat partisipasi warga komunitas secara keseluruhan cenderung rendah (Dwiana & Wahyuni, 2013).

Sesuai karakteristiknya, pengelolaan radio komunitas harus bertumpu pada partisipasi khalayaknya. Dalam konteks Radio Komunitas Dapur Remaja, secara umum, faktor pengelolaan Radio Komunitas Dapur Remaja dipengaruhi tiga aspek, yaitu: partisipasi komunitas, pengelolaan radio komunitas dan gap komunikasi antargenerasi. Hal ini melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arya & Kashyap (2019) yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi fungsi radio komunitas, yakni: organisasi, masyarakat dan peran yang dimainkan oleh pengelola radio komunitas (ketokohan).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gap komunikasi antargenerasi dalam pengelolaan radio komunitas disebabkan oleh adanya perubahan sosial dan budaya di wilayah komunitas tersebut. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pesatnya pembangunan di wilayah Sawangan yang menjadi daerah penyangga ibukota dan berdampak pada perubahan perilaku sosial, termasuk perhatian dan kepedulian terhadap kearifan lokal. Dalam studi kasus pada Radio Komunitas Dapur Remaja (RKDR) di Cinangka, Sawangan, Depok, ditemukan bahwa perubahan sosial dan budaya tersebut memengaruhi pola pikir individu dan interaksi sosial di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada perubahan nilai-nilai sosial yang sebelumnya mengutamakan semangat keeratan dan guyub,

menjadi berorientasi individual. Semangat komunitas yang pernah dirintis oleh pendiri radio komunitas terdahulu perlahan pudar, sejalan dengan berlangsungnya regenerasi kepada pengelola radio komunitas yang lebih muda. Terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di kalangan anggota komunitas terdahulu yang masih menginginkan pola materi dan kegiatan yang lama dalam program materi siaran radio komunitas saat ini. Di sisi lain, tuntutan untuk mendapatkan pemasukan agar radio komunitas ini tetap berjalan, membuat pengelola baru harus memikirkan cara-cara baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. Akan tetapi, generasi terdahulu tetap menginginkan pola lama yang membuat anggota komunitas solid dan guyub, terutama dalam konteks interaksi sosial.

Pengelola perlu melakukan *baseline survey* yang selama ini tidak pernah dilakukan untuk mengetahui posisi RKDR saat ini untuk memahami kebutuhan komunitasnya. Pengelola juga harus menggelar diskusi mendalam secara rutin dengan seluruh anggota komunitas guna melakukan *repositioning* dan menetapkan tujuan radio komunitas. Ini terkait prinsip radio komunitas, yakni dari, untuk dan oleh komunitas. Pengelola dan anggota juga harus menghidupkan kembali nilai-nilai komunitas melalui radio komunitas yang dijadikan wadah untuk diskusi warga. Diskusi melalui radio komunitas tentunya dirancang melalui program-program dan siaran yang mengakomodasi kebutuhan komunitas.

Nilai-nilai komunitas perlu digalakkan kembali, dengan membuat dan menghidupkan kembali program berbasis komunitas sehingga dapat merekatkan kembali kebersamaan antaranggota komunitas. Mempertahankan posisi sebagai radio komunitas bukanlah hal yang mudah dan hal tersebut menjadi

tantangan bagi pengelola radio komunitas. Jika RKDR tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai radio komunitas, maka semua pihak harus menjaga, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi kebutuhan warga komunitas dan relawan. Pendanaan juga harus diupayakan secara maksimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan jaringan yang dimiliki (*networking*) dan mempersiapkan proses regenerasi melalui kaderisasi yang tepat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Hibah Penelitian Disertasi Doktor (PDD) untuk melaksanakan program belajar dan membantu dana penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila atas izinnya, sehingga peneliti bisa melanjutkan pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2017). Analisis teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 1–21.
- Abdullah, S. (2013). Potensi dan kekuatan modal social dalam suatu komunitas. *Socius*, 12(1), 1–8.
- Agustin, D. S. Y. (2011). Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.632>
- Al-hassan, S., Andani, A., & Abdul-Malik, A. (2011). The Role of Community Radio in Livelihood Improvement. *Field Actions Science Reports*, 5, 1–7. <https://journals.openedition.org/factsreports/869>
- Alabi D.L., & Famakinwa M. (2017). Effects of community conflicts on rural economic activities in Osun State, Nigeria: Implication for sustainable development. *Ife Journal of Agriculture*, 29(1), 63–73.
- Aminah, S., Sumardjo, Lubis, D., & Susanto, D. (2014). Perubahan model komunikasi dan pergeseran paradigma pembangunan dalam perspektif sejarah. *Paramita Historical Studies Journal*, 24(1).
- Anggraeni, D. (2018). Radio komunitas anak muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 14(2), 15–29.
- Arya, N., & Kashyap, S. K. (2019). An analysis of the Factors Affecting the Functioning of the Community Radio Stations: A Review Paper. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8(03). <https://doi.org/10.20546/ijemas.2019.803.087>
- Asenjo, PC. (2019). Conflict resolution in community development: Are the benefits worth the costs? *Critical Social Policy*, 39(2). <https://doi.org/10.1177/0261018318780162>
- Bakti, A. F. (2004). *Communication and family planning in Islam in Indonesia. South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program*. INIS.
- Bello, A. K., & Wilkinson, K. (2017). The perception of community radio as public sphere and its potential impact on political action: lessons from Tanzania. *Journal of Development and Communication Studies*, 5(1), 22–43. <https://doi.org/10.4314/jdcs.v5i1.2>
- Birowo MA, Prakoso I, & Nasir A. (2015). *Mengapa radio komunitas (Why community radio)?*. Combine Resource Institution.
- BPS Kota Depok. (2018). *BPS (Badan Pusat*

- Statistik Kota Depok*.  
<https://depokkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>.
- Chaerowati, D. L., Yuliati, N., & Rochim, M. (2013). Mengusung Masyarakat Madani Melalui Radio Komunitas. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.399>
- Chikaipa, V., & Gunde, A. M. (2020). The Role of Community Radio in Promotion of Indigenous Minority Languages and Cultures in Malawi. *Journal of Radio & Audio Media*. <https://doi.org/10.1080/19376529.2020.1751633>
- Dwiana, R., & Wahyuni, H. I. (2013). Radio komunitas untuk pemberdayaan perempuan. *IPTEK-KOM*, 15(2), 117–134.
- Eddyono, A. (2012). Radio komunitas dan kegagalannya sebagai media counter hegemony. *Jurnal Communication Spectrum*, 2(1), 1–17.
- Effendy, R. (2013). Peran radio komunitas dalam menumbuhkembangkan civic community. *Jurnal Komunikator*, 1–26.
- Freire, P. (2018). *Pendidikan kaum tertindas*. LP3ES.
- Gaynor, N., & O'Brien, A. (2012). Because it all begins with talk: community radio as a vital element in community development. *Community Development Journal*, 47(3). <https://doi.org/10.1093/cdj/bsr058>
- Goodman, R. D., & West-Olatunji, C. A. (2009). Applying Critical Consciousness: Culturally Competent Disaster Response Outcomes. *Journal of Counseling & Development*, 87(4). <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2009.tb00130.x>
- Juditha, C. (2015). Pemberdayaan radio komunitas sebagai media informasi di tapal batas Papua. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 5–18.
- Kahn, R., & Kellner, D. (2007). Paulo Freire and Ivan Illich: Technology, Politics and the Reconstruction of Education. *Policy Futures in Education*, 5(4). <https://doi.org/10.2304/pfie.2007.5.4.431>
- Kridasaksana, D., Junaidi, M., & Aryaputra, M. I. (2015). Tujuan negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas ditinjau dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (Studi kasus di wilayah Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 242–257.
- Matthews, P. (2016). Social media, community development and social capital. *Community Development Journal*, 51(3). <https://doi.org/10.1093/cdj/bsv040>
- Nasdian, F. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Indeks.
- Ngugi, P. (2015). Using Community Radios as a Tool for Development. *Journal of Mass Communication & Journalism*, 05(06). <https://doi.org/10.4172/2165-7912.1000263>
- Pace, R., & Faules, D. (2010). *Komunikasi organisasi. Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Pawito. (2007). Media Komunitas dan Media Literacy. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 4(2), 167–177.
- Podber, J. J. (2012). Interactive community radio: An examination of community radio in Central Mexico. *Intercultural Communication Studies*, XX!(1), 131–139.
- PP No. 51 Tahun 2005. (n.d.). *Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran lembaga komunitas*. Retrieved May 19, 2021, from [https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/07/pp\\_no\\_51\\_th\\_2005.pdf](https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/07/pp_no_51_th_2005.pdf) .
- Purnamasari, N., Guntoro, B., & Subejo.

- (2014). Peran Jaringan Media Komunitas dalam Mendorong Partisipasi Radio Komunitas pada Pembangunan. In M. Nazaruddin (Ed.), *Prosiding Konferensi Kajian Komunikasi, Budaya, dan Media* (pp. 296–303). Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.
- Sanjaya, A., & Pandiangan, A. (2019). Pergulatan di balik frekuensi: Studi deskriptif radio komunitas di Jawa Tengah. *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 42–51.
- Sarmiati. (2012). Strategi komunikasi berbasis kearifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 28–39.
- Takariani, C. S. D. (2013). Peluang dan tantangan radio komunitas di era konvergensi. *Observasi*, 11(1), 23–38.
- Triyono, A. (2014). Pemberdayaan masyarakat melalui community development program posdaya (Pos pemberdayaan keluarga) PT. Holcim Indonesia TBK pabrik Cilacap. *KomuniTi*, VI(2), 111–121.
- Usman, R. (2001). Konflik dalam Perspektif Komunikasi: Suatu Tinjauan Teoretis. *Mediator*, 2(1), 31–41.
- UU No. 32 Tahun 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*. Retrieved May 19, 2021, from <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/ UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf>.
- UU No. 40 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers*. Retrieved May 19, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /45370/uu-no-40-tahun-1999>
- Wahyuningsih, S. (2014). Analisis kendala perizinan spektrum frekuensi radio untuk radio komunitas. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(1). <https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.12 0103>
- Wijanarko, Sarwoprasodjo, S., & Rangkuti, P. A. (2014). Komunikasi penyadaran kritis gerakan petani. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3457>
- Wilkins, K. G., Tufte, T., & Obregon, R. (2014). *The handbook of development communication and social change*. Willey Blackwell .
- Yuliasari, I., Saleh, A., Hubeis, M., & Sarwoprasodjo, S. (2017). Meretas hambatan komunikasi perdesaan dengan media komunitas di daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 5(2), 191–212.
- Yunita, D. (2017). PERUBAHAN INFRASTRUKTUR SOSIAL SEBAGAI IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PERTANIAN (Kasus Pada Masyarakat Petani Kelapa Sawit). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13307>
-

